



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung - 40115

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1617/KPG.04.01/MP/2022

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

#### GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Nomor: 16561/KPG.07/Sekre tanggal 14 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

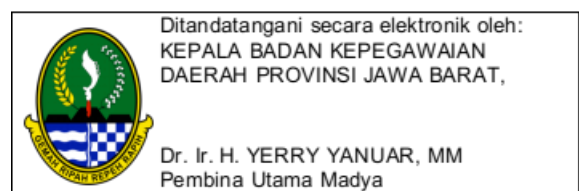
#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
742	IMAS MASRIPAH, S.Pd	197702062014102001	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 3 KOTA SUKABUMI, SMKN 3 SUKABUMI KOTA SUKABUMI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 3 KOTA SUKABUMI, SMKN 3 SUKABUMI KOTA SUKABUMI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
743	NURHAYATI	197306072014122003	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 NGAMPRAH, SMAN 1 NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 NGAMPRAH, SMAN 1 NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
744	JAANG SUHERMAN	196510221991121001	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 CILAKU, SMAN 1 CILAKU KABUPATEN CIANJUR, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 CILAKU, SMAN 1 CILAKU KABUPATEN CIANJUR, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
745	ASEP GINANJAR PRIAUTAMA	196709232014071001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 PACET, SMAN 1 PACET KABUPATEN CIANJUR, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 PACET, SMAN 1 PACET KABUPATEN CIANJUR, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
746	MAYASARI	197108141994032002	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 10 BANDUNG, SMAN 10 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 10 BANDUNG, SMAN 10 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
747	ERLIN YULIANTI, S.P	198207052014072002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	S1	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 2 PACET, SMKN 2 PACET KABUPATEN CIANJUR, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 2 PACET, SMKN 2 PACET KABUPATEN CIANJUR, SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
748	DADAN SUARMAN	196505071988031023	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 2 BANDUNG, SMAN 2 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 2 BANDUNG, SMAN 2 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
749	ZAENI RAHMAT	197711122014081001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 2 BANDUNG, SMAN 2 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 2 BANDUNG, SMAN 2 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
750	ELA SOLIHAT, S.Pd	196508231991122001	Penata (III/c)	S1	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 11 BANDUNG, SMKN 11 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 11 BANDUNG, SMKN 11 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
751	KIKI SAPUTRA	197911102014111001	Pengatur TK.I (II/d)	D4	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 11 BANDUNG, SMKN 11 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 11 BANDUNG, SMKN 11 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
752	ELFI SANFITRI NASUTION, S.Sos	196801071990012001	Penata TK.I (III/d)	S1	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 3 BANDUNG, SMKN 3 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMKN 3 BANDUNG, SMKN 3 BANDUNG KOTA BANDUNG, SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
753	SRI DEWI ANGGRAENI, A.Md.	198112122014102001	Penata Muda (III/a)	S1	5	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 CIMAHI, SMAN 1 CIMAHI KOTA CIMAHI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA CIMAHI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	PENGADMINISTRASI UMUM	TATA USAHA SMAN 1 CIMAHI, SMAN 1 CIMAHI KOTA CIMAHI, SATUAN PENDIDIKAN KOTA CIMAHI, CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

